CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KAB.KEBUMEN TA 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah melalui azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kesehatan, perlu adanya fasilitasi serta pembentukan unit kerja yang akan mengelola bidang kesehatan.

Pengelolaan bidang kesehatan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di Bidang Kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam urusan kesehatan.
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum di Bidang Kesehatan.
3. Pembinaan dan Pelaksanaan Urusan di Bidang Kesehatan.
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya

1.2 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good*

governance).

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan

Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 105 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 106Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 13)

1.4 Sistematika Penulisan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Tugas Pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

1.1

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

2.1 Iikhtisar Realisasi PencapaianTarget Kinerja Keuangan

2.1.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2023 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai sebesar Rp.267.226.422.229 atau 114,35 % dari anggaran sebesar Rp. 233.679.122.000. Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Retibusi Pelayanan Kesehatan	725.000.000	796.100.500	71.100.500	109,80	1.305.252.800
2.	Lain-lain PAD yang Sah	232.954.122.000	266.430.321.729	33.476.199.729	114,14	320.331.784.898
Jumlah		233.679.122.000	267.226.422.229	33.547.300.229	114,35	321.637.037.698

2.1.2 Belanja

Realisasi Belanja TA 2023 sebesar Rp. 584.644.611.272 dari anggaran sebesar Rp. 560.651.430.901 atau mencapai 95,90 %. Dan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp. 570.379.246.579,-, realisasinya mengalami kenaikan sebesar 1,54 %.

1. Realisasi Belanja Per Akun

Rincian realisasi belanja per akun disajikan sebagai berikut

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
	T.A 2023	T.A 2023	
BELANJA			
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	135.988.383.272	133.842.485.340	
Belanja Barang dan Jasa	392.408.045.000	374.381.982.243	
Belanja Hibah	360.000.000	232.840.000	

Belanja Bantuan Sosial	156.337.000	156.336.150	
Jumlah Belanja Operasi			
BELANJA MODAL			
Belanja Modal Tanah			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.181.511.663	29.370.450.955	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.553.277.337	20.693.933.580	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.994.557.000	1.973.402.633	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.500.000	0	
Belanja Modal Aset Lainnya			
Jumlah Belanja Modal			
JUMLAH BELANJA			

Total realisasi belanja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 560.651.430.901,00 Jumlah tersebut mencapai 95,90 % dari total anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 584.644.611.272,00. Pada Belanja Operasi yang dianggarkan sebesar Rp. 528.912.765.272,00 terealisasi sebesar Rp. 508.613.643.733,00 atau sebesar 96,15 %, yang terdiri dari belanja pegawai APBD sebesar Rp. 135.988.383.272,00 dengan realisasi sebesar Rp 133.842.485.340,00 (98,42 %) dan belanja barangdan jasa yang dianggarkan sebesar Rp. 392.408.045.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 374.381.982.243,00 (95,41 %). Pada Belanja Modal yang dianggarkan sebesar 55.731.846.000,00 terealisasi sebesar Rp. 52.037.787.168,00 (93,37 %). Dari belanja tersebut di atas merupakan dana dari sumber APBD dan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah serta pada 35 Puskesmas di Kabupaten Kebumen.

2. Realisasi Belanja per Sub Kegiatan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA
			TOTAL	%	ANGGARAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	35.000.000,00	33.655.750,00	96,16	1.344.250,00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000,00	37.841.300,00	94,60	2.158.700,00
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	133.820.918.000,00	128.253.310.052,00	95,84	5.567.607.948,00
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	423.912.000,00	412.690.909,00	97,35	11.221.091,00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	19.965.000,00	99,83	35.000,00
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.500.000,00	44.450.000,00	99,89	50.000,00

7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.000.000,00	54.995.500,00	99,99	4.500,00
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.250.000,00	2.110.000,00	93,78	140.000,00
9	Penyediaan Bahan/Material	80.000.000,00	79.706.500,00	99,63	293.500,00
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00	29.992.000,00	99,97	8.000,00
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.000.000,00	3.999.700,00	99,99	300,00
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.650.000,00	15.631.980,00	72,20	6.018.020,00
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.320.000,00	18.725.000,00	92,15	1.595.000,00
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.940.420,00	97,02	59.580,00
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Suber Daya Air dan Listrik	521.410.000,00	468.374.906,00	89,83	53.035.094,00
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	124.000.000,00	123.751.400,00	99,80	248.600,00
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	178.000.000,00	162.582.176,00	91,34	15.417.824,00
18	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	9.970.000,00	99,70	30.000,00
19	Pemelihraan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.350.000,00	66.054.100,00	99,55	295.900,00
20	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.500.000,00	57.475.000,00	99,96	25.000,00
21	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	339.164.489.000,00	319.283.637.869,00	94,14	19.880.851.131,00
22	Pembangunan Puskesmas	130.000.000,00	128.764.023,00	99,05	1.235.977,00
23	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.000.692.000,00	923.127.573,00	92,25	77.564.427,00
24	Rehabilitasi dan Pemelihraan Rumah Sakit	945.300.000,00	945.185.163,00	99,99	114.837,00
25	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	155.000.000,00	153.798.000,00	99,22	1.202.000,00
26	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.161.548.000,00	3.036.209.461,00	96,04	125.338.539,00
27	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.731.378.000,00	10.168.649.811,00	94,76	562.728.189,00
28	Pengadaan Obat, Vaksin	6.152.156.000,00	6.071.581.940,00	98,69	80.574.060,00
29	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.907.173.000,00	2.892.228.945,00	99,49	14.944.055,00
30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.026.229.000,00	2.018.678.060,00	99,63	7.550.940,00
31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.037.851.000,00	654.182.400,00	63,03	383.668.600,00
32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	484.560.000,00	455.448.894,00	93,99	29.111.106,00
33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	5.243.402.000,00	5.232.449.613,00	99,79	10.952.387,00
34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.088.139.000,00	1.072.567.500,00	98,57	15.571.500,00
35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	6.695.196.000,00	6.655.751.680,00	99,41	39.444.320,00
36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.628.391.000,00	1.609.599.720,00	98,85	18.791.280,00
37	Pengelolan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	700.690.000,00	690.301.800,00	98,52	10.388.200,00
38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	563.988.000,00	555.731.510,00	98,54	8.256.490,00
39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	892.442.000,00	879.618.069,00	98,56	12.823.931,00

40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.569.324.000,00	2.529.598.200,00	98,45	39.725.800,00
41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	965.353.000,00	957.026.155,00	99,14	8.326.845,00
42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.910.126.000,00	1.436.228.600,00	75,19	473.897.400,00
43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	60.000.000,00	53.698.400,00	89,50	6.301.600,00
44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.061.828.000,00	4.920.368.886,00	97,21	141.459.114,00
45	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	110.000.000,00	108.390.000,00	98,54	1.610.000,00
46	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.291.594.000,00	3.738.868.388,00	70,66	1.552.725.612,00
47	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesahatan	7.846.532.000,00	7.722.907.142,00	98,42	123.624.858,00
48	Pengelolaan Pelayanan KesehatanTradisional , Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	50.000.000,00	49.996.000,00	99,99	4.000,00
49	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.026.938.000,00	910.001.012,00	88,61	116.936.988,00
50	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	180.000.000,00	177.241.912,00	98,47	2.758.088,00
51	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.662.442.000,00	2.629.310.450,00	98,76	33.131.550,00
52	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	23.282.690.000,00	23.082.118.708,00	99,14	200.571.292,00
53	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	50.000.000,00	37.718.000,00	75,44	12.282.000,00
54	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	10.385.241.000,00	9.320.531.000,00	89,75	1.064.710.000,00
55	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.247.295.000,00	1.864.050.104,00	82,95	383.244.896,00
56	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	60.000.000,00	59.999.500,00	100,00	500,00
57	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	150.000.000,00	144.212.991,00	96,14	5.787.009,00
58	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	25.000.000,00	24.258.010,00	97,03	741.990,00
59	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
60	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	45.000.000,00	44.911.738,00	99,80	88.262,00
61	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuia Standar	2.200.000.000,00	2.199.643.137,00	99,98	356.863,00
62	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000,00	64.959.400,00	99,94	40.600,00
63	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek , Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.960.000,00	63.912.025,00	99,92	47.975,00
64	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	414.376.000,00	411.734.854,00	99,36	2.641.146,00
65	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	0,00
66	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	210.000.000,00	208.950.051,00	99,50	1.049.949,00
67	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	172.500.000,00	172.500.000,00	100,00	0,00
68	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	60.000.000,00	56.265.166,00	93,78	3.734.834,00
69	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berncana dan Pembangunan Keluarga	100.000.000,00	98.589.200,00	98,59	1.410.800,00

70	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	30.000.000,00	29.801.500,00	99,34	198.500,00
71	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	36.340.000,00	36.300.000,00	99,89	40.000,00
72	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	124.800.000,00	88.992.612,00	71,31	35.807.388,00
73	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	64.375.000,00	48.752.750,00	75,73	15.622.250,00
74	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000,00	24.600.000,00	98,40	400.000,00
75	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronil Serta Media Luar Ruang	94.640.000,00	43.930.475,00	46,42	50.709.525,00
76	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melaui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	405.600.000,00	170.550.000,00	42,05	235.050.000,00
77	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	1.059.456.000,00	1.022.928.664,00	96,55	36.527.336,00
78	Pengendalian Program KKBPK	40.000.000,00	39.550.000,00	98,88	450.000,00
79	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	3.371.634.000,00	3.352.310.243,00	99,43	19.323.757,00
80	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	25.200.000,00	23.300.100,00	92,46	1.899.900,00
81	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.541.832.000,00	2.108.809.270,00	82,96	433.022.730,00
82	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.257.312.000,00	1.138.434.900,00	90,55	118.877.100,00
83	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilatas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19.800.000,00	18.580.000,00	93,84	1.220.000,00
84	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	20.000.000,00	19.996.900,00	99,98	3.100,00
85	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.321.667.000,00	1.306.287.360,00	98,84	15.379.640,00
86	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluraga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	335.000.000,00	308.924.400,00	92,22	26.075.600,00
87	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	134.229.000,00	121.484.002,00	90,51	12.744.998,00
88	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksanaan (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5.875.186.000,00	3.747.405.500,00	63,78	2.127.780.500,00
89	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	80.000.000,00	78.092.500,00	97,62	1.907.500,00
90	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	60.000.000,00	59.037.350,00	98,40	962.650,00
JUMLAH		**604.617.704.000,00**	**570.365.791.279,00**	**94,33**	**34.251.912.721 ,00**

2.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti karena pendapatan mencapai lebih dari 100 %, namun ada beberapa kegiatan yang realisasinya dibawah 75% diantaranya sebagai berikut : Belanja

Belanja langsung terserap 94,34% dikarenakan adanya sub kegiatan yang tidak bisa direalisasikan secara maksimal. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota tidak bisa memaksimlakan penyerapan anggaran.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN

3.1 Laporan Realisasi Anggaran

1. PENDAPATAN

Jumlah anggaran Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp.253.423.014.000 Terealisasikan sebesar Rp.321.637.037.698 atau 126,92% dari target yang ditetapkan.

Realisasi Pendapatan

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN KEBUMEN

Tahun Anggaran 2023

Pendapatan	**Anggaran (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**Lebih / (Kurang) (Rp)**	**%**	***)Realisasi 2022 (Rp)**
Pendapatan Daerah	253.423.014.000	321.637.037.698	68.214.023.698	126,92	296.170.027.523

Pendapatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 melebihi target sebesar 127,10% dari anggaran dan turun 0,63% dari realisasi Tahun 2022.

a) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 253.423.014.000,00 terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah	2023		%	Realisasi 2022 (Audited)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		(Rp)
Pajak Daerah				
Retribusi Daerah	725.000.000	1.305.252.800	180,03	1.500.485.137
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	252.698.014.000	320.331.784.898	126,76	294.669.542.386
Jumlah	253.423.014.000	321.637.037.698	126,92	296.170.027.523

Anggaran Realisasi

1) Pajak Daerah	Rp .....,00	Rp ..... ,00

Pajak Daerah sebesar Rp 0,00 terdiri dari:

Pajak Daerah	2023		%	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pajak Hotel	-	-	-	-
Pajak Restoran	-	-	-	-
Pajak Hiburan	-	-	-	-
Pajak Reklame	-	-	-	-
Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	-
Pajak Parkir	-	-	-	-
Pajak Air Tanah	-	-	-	-
Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	-	-
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	-	-	-
BPHTB	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

	Anggaran	Realisasi
2) Retribusi Daerah	Rp. 725.000.000,00	Rp.1.305.252.800,00

Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp. 725.000.000,00 terdiri dari:

Retribusi	Tahun 2023		%	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	725.000.000	1.305.252.800	180,03	1.500.485.137
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	-	-	-	-
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	-	-	-
Retribusi Pelayanan Pasar	-	-	-	-
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
Retribusi Pelayanan Pendidikan	-	-	-	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	-

Retribusi Tempat Pelelangan	-	-	-	-
Retribusi Terminal	-	-	-	-
Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	-	-	-
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	-	-	-	-
Retribusi Rumah Potong Hewan	-	-	-	-
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	-	-	-	-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	-
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-	-	-
Retribusi Izin Gangguan	-	-	-	-
Retribusi Izin Trayek	-	-	-	-
	-	-	-	-

Pendapatan dari Retribusi terealisasi 180,03%, mengalami penurunan sebesar 0,06% jika dibandingkan pendapatan Retribusi Tahun 2022 yang sebesar Rp.1.500.485.137,00.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dikelola Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen terealisasi sebesar Rp. 252.698.014.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 320.331.784.898,00 terdiri dari:

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2023		(%)	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-
Penerimaan Jasa Giro	-	-	-	-
Pendapatan Bunga	-	-	-	-
Pendapatan DendaKeterlam-batan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-
Pendapatan denda pajak	-	-	-	-

Pendapatan denda retribusi	-	-	-	-
Pendapatan dari pengembalian	-	-	-	-
Pendapatan dari BLUD	252.698.014.000	320.800.626.098	126,95	294.669.542.386
Lain-lain PAD yang syah lainnya	-	-	-	-
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	-	-	-
Hasil Pengelolaan dana Bergulir	-	-	-	-
Dana BOS	-	-	-	-
Jumlah	252.698.014.000	320.800.626.098	126,95	294.669.542.386

B. BELANJA- LRA

Realisasi belanja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen TA. 2023 adalah sebesar Rp.570.379.246.579,- atau 94,34% dari anggaran sebesar Rp.604.617.704.000,- Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA. 2023 tersaji sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	PROSENTASE	REALISASI 2022
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	136.434.355.000,00	130.297.027.522,00	95,50	140.221.930.168,00
Belanja Barang dan Jasa	384.519.244.000.00	363.858.299.104,00	94,63	350.850.912.934,00
Belanja Hibah	330.000.000,00	304.000.000,00	92,12	1.146.916.000,00
Belanja Bantuan Sosial	3.302.754.000,00	1.809.490.550,00	54,79	2.862.746.000,00
Jumlah Belanja Operasi	524.586.353.000,00	496.268.817.176,00	94,60	495.082.505.102,00
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah	157.710.000,00	32.747.550,00	20,76	628.973.110,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.721.666.000,00	63.730.108.209,00	94,11	57.875.166.420,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.425.843.000,00	9.808.494.384,00	85,84	19.207.905.797,00
Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan	230.192.000,00	221.692.260,00	96,31	466.936.350,00
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	15.000.000,00	5.400.000,00	36,00	5.340.000,00

Belanja Modal Aset Lainnya	480.940.000,00	311.987.000,00	64,87	724.272.000,00
Jumlah Belanja Modal	8.003.1351.000,00	74.110.429.403,00	92,60	78.908.593.677,00
JUMLAH BELANJA	604.617.704.000,00	570.379.246.579,00	94,34	573.991.098.779,00

Berdasarkan Tabel diatas Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dengan TA. 2022 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA.2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 3.611.852.200,-

Dengan rincian Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp.1.186.312.074 dan Belanja Modal turun Rp. 4.798.164.274.

a) Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi sebesar Rp.496.268.817.176,00 mencapai 94,60% dari anggaran sebesar Rp. 524.586.353.000,00, apabila dibandingkan dengan realisasi 2022 yang sebesar Rp.495.082.505.102 mengalami peningkatan sebesar 0,24%.

Belanja operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Adapun rincian realisasi atas Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial TA. 2023 tersaji sebagai berikut :

Adapun rincian realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
BELANJA OPERASI	524.586.353.000,00	496.268.817.176,00	(28.317.535.824,00)
Belanja Pegawai	136.434.355.000,00	130.297.027.522,00	(6.137.327.478,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	126.101.945.000,00	120.696.987.065,00	(5.404.957.935,00)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.707.773.000,00	5.558.208.525,00	(149.564.475,00)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.767.941.000,00	3.572.590.607,00	(195.350.393,00)
Belanja Pegawai BLUD	856.696.000,00	469.241.325,00	(387.454.675,00)
Belanja Barang dan Jasa	384.519.244.000,00	363.858.299.104,00	(20.660.944.896,00)

Belanja Barang	38.793.504.000,00	38.351.211.890,00	(442.292.110,00)
Belanja Jasa	48.325.846.000,00	44.730.388.439,00	(3.595.457.561,00)
Belanja Pemeliharaan	762.435.000,00	762.099.500,00	(335.500,00)
Belana Perjalanan Dinas	22.198.777.000,00	20.027.621.364,00	(2.171.155.636,00)
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	27.900.000,00	18.000.000,00	(9.900.000,00)
Belanja Barang dan Jasa BLUD	274.410.782.000,00	259.968.977.911,00	(14.441.804.089,00)
Belanja Hibah	330.000.000,00	304.000.000,00	(26.000.000,00)
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	330.000.000,00	304.000.000,00	(26.000.000,00)
Belanja Bantuan Sosial	3.302.754.000,00	1.809.490.550,00	(1.493.263.450,00)
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.302.754.000,00	1.809.490.550,00	(1.493.263.450,00)

b) Belanja Modal

Realisasi belanja modal tahun 2023 sebesar Rp.74.110.429.403 atau tercapai 92,60% dari anggaran sebesar Rp.80.031.351.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp.78.908.593.677,00 realisasi belanja modal tahun 2023 turun sebesar 6,08%.

Adapun rincian realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:

Belanja Modal	2023		%	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Tanah	**157.710.000**	**32.747.550**	**20,76**	**-124.962.450**
Belanja Modal Tanah	157.710.000	32.747.550	20,76	-124.962.450
Belanja Peralatan dan Mesin	**67.721.666.000**	**63.730.108.209**	**94,11**	**-3.991.557.791**
Belanja Modal Alat Besar	334.025.000	328.757.100	98,42	-5.267.900
Belanja Modal Alat Angkutan	3.201.987.000	2.878.532.000	89,90	-323.455.000
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	106.930.000	92.385.363	86,40	-14.544.637

Belanja Modal Alat Pertanian	11.250.000	8.250.000	73,33	-3.000.000
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.132.281.450	4.376.336.483	85,27	-755.944.967
Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	283.837.500	181.583.355	63,97	-102.254.145
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	54.046.358.050	51.876.531.684	95,99	-2.169.826.366
Belanja Modal Alat Laboratorium	601.311.000	550.710.008	91,58	-50.600.992
Belanja Modal Komputer	3.949.176.000	3.382.899.216	85,66	-566.276.784
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	43.850.000	43.639.000	99,52	-211.000
Belanja Modal Peralatan Olahraga	10.660.000	10.484.000	98,35	-176.000
Belanja Gedung dan Bangunan	**11.425.843.000**	**9.808.494.384**	**85,84**	**-1.617.348.616**
Belanja Modal Bangunan Gedung	11.391.723.000	9.775.535.384	85,81	-1.616.187.616
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	34.120.000	32.959.000	96,60	-1.161.000
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	**230.192.000**	**221.692.260**	**96,30**	**-8.499.740**
Belanja Modal Instalasi	210.000.000	210.000.000	100	0
Belanja Modal Jaringan	20.192.000	11.692.260	57,91	-8.499.740
Belanja Aset tetap Lainnya	**495.940.000**	**317.387.000**	**64,00**	**-178.553.000**
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	15.000.000	5.400.000	36,00	-9.600.000
Belanja Aset Tak Berwujud	480.940.000	311.987.000	64,87	-168.953.000
JUMLAH	**80.031.351.000**	**74.110.429.403**	**92,60**	**-5.920.921.597**

Belanja modal yang realisasinya tertinggi sebesar 96,30% adalah Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Sedangkan belanja modal yang realisasinya terendah yaitu belanja modaltanah dengan realisasi 20,76% Kontribusi terbesar belanja modal adalah belanja modal gedung dan bangunan, yang mencapai 85,84% dari total belanja modal, kemudian belanja modal peralatan dan mesin sebesar 94,11%, belanja modal aset tetap lainnya 64,00%.

C. LAPORAN OPERASIONAL

1. Pendapatan –LO

Pendapatan - LO Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.500.485.137,- dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan – LO

No	Pendapatan – LO	2023 (Rp)	2022 (Audited) (Rp)
1	PAD – LO	267.583.144.876	250.275.001.432
2	Transfer – LO	25.698.961.000	
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO		104.570.775
	Jumlah	293.282.105.876	250.319.717.070,

Dari tabel diatas dapat diketahui pendapatan LO tahun 2023 naik sebesar Rp.42.962.388.806,atau sebesar 17,16% dibandingkan tahun sebelumnya.

1. Beban

Realisasi Beban Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKabupaten Kebumen pada TA.2023 adalah sebesar Rp.454.111.918.230,86 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban TA 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	Kenaikan /Penurunan %
BEBAN			
Beban Operasi	541.685.086.673	519.670.950.982	**4,24**
Beban Transfer	-	-	
Beban Luar Biasa	**-**	**-**	

Total Beban	541.685.086.673	519.670.950.982	**4,24**

a. Beban Operasi

Beban Operasi tahun 2023 sebesar Rp.541.685.086.673 terdiri dari:

Realisasi Beban Operasi

No	Beban	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Pegawai	133.355.413.957,00	131.838.058.135,00	1,15
2	Beban Persediaan	67.389.960.645.00	57.446.021.875,05	17,31
6	Beban Jasa	320.442.444.205,93	245.538.326.406,68	30,51
7	Beban Pemeliharaan	347.697.700,00	746.895.500,00	-53,45
8	Beban Perjalanan Dinas Biasa	19.625.464.084,00	20.027.621.364,00	-2,01
9	Beban Hibah	232.840.000,00	304.000.000,00	-23,41
10	Beban Bantuan Sosial	156.336.150,00	1.809.490.550,00	-91,36
11	Beban Penyisihan Piutang	134.929.932,00	331.319.027,40	-59,27
17	Beban Penyusutan dan Amortisasi		61.629.218.124,00	-100,00
Jumlah		541.685.086.673,93	519.670.950.982,13	4,24

Dari tabel diatas dapat diketahui Beban LO tahun 2023 naik sebesar Rp.22.014.135.691,80 atau sebesar 4,24% dibandingkan tahun sebelumnya.

a. Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.133.355.413.957,,-

b. Beban Persediaan

Realisasi Beban Persediaan TA 2023 sebesar Rp 67.389.960.645,-

c. Beban Jasa

Realisasi Beban Jasa pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen TA 2023 sebesar Rp 320.442.444.205,93,-.

d. Beban Pemeliharaan

Realisasi Pemeliharaan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen TA. 2023 sebesar Rp. 347.697.700,-

e. Beban Perjalanan Dinas

Realisasi Beban Pemeliharaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Ta. 2023 sebesar Rp.19.625.464.084,-

f. Beban Hibah

Beban Hibah TA. 2023 sebesar Rp. 232.840.000,-

g. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial TA. 2023 sebesar Rp.156.336.150,-

h. Beban Penyisihan Piutang

Rincian Beban Penyisihan Piutang

No	Jenis Beban	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	134.929.932	331.319.027-
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Jumlah	134.929.932	331.319.027-

i. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 0,00

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

NO	Jenis Beban	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	
4.	Beban Penyusutan Aset lainnya		
5.	Beban Amortisasi Aset Tdak Berwujud	0,00	
	Jumlah	0,00	61.629.218.124

Surplus/defisit –LO

Surplus defisit – LO untuk tahun 2023 sebesar Rp. 248.402.980.797,09 atau turun sebesar 20.948.253.114,71 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp.269.351.233.911,-

D. Neraca

1. ASET

a. Aset Lancar

Nilai Aset Lancarper 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 92.155.699.323,37,- dan Rp 156.625.754.035,30,-

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Aset Lancar	TA 2022	TA 2020
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	49.367.509.581,98	87.496.345.014,98
	Kas Lainnya	1.208.402.886,,00	0,00
	Piutang Retribusi	22.600.000,00	0,00
12	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	17.172.253.920,00	17.100.700.227,00
15	Penyisihan Piutang	(1.876.744.550,00)	(1.741.814.618,00)
	Beban Dibayar Dimuka	107.652.425,00	0,00
17	Persediaan	26.154.025.060,39	53.770.523.411,32
JUMLAH ASET LANCAR		92.155.699.323,37	156.625.754.035,30

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- . saldo ini merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal neraca.

2) Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing Rp …,- dan Rp 0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai yang berada dibawah tanggung jawab

Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa pelayanan dan pendapatan lain yang sah.

3) Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp 49.367.509.581,98.- terdiri dari saldo kas di UPT Puskemas dan Rumah Sakit Umum Daerah.

4) Piutang

Piutang Pendapatan

Saldo Piutang per 31 Desember 2023 disajikan bruto sebelum dikurangi penyisihan piutang yang disajikan terpisah pada akun Penyisihan Piutang. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Saldo Piutang sebesar Rp 17.194.853.920,-terdiri dari:

Rincian Piutang

per 31 Desember 2023

PIUTANG DAERAH	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Audited) (Rp)
1) Piutang Pendapatan		
a. Piutang Pajak	-	-
b. Piutang Retribusi	22.600.000,00-	0,00
c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-
d.Piutang Lain-Lain PAD yang sah	17.172.253.920,	17.100.700.227,00-
2) Piutang Lainnya	-	-
JUMLAH	17.194.853.920	17.100.700.227,00

Daftar saldo piutang per UPT Dinas Kesehatan Pengendalain Penduduk dan Keluarga

5) Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.26.154.025.060,39,- dan Rp. 53.770.523.411,32,-

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun saldo persediaan sebesar Rp.26.154.025.060,39,- merupakan saldo persediaan atas Bahan, Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor, Obat-obatan dan Natura dan Pakan yang belum habis/belum digunakan sampai dengan tanggal neraca.

Persediaan bahan habis pakai terdiri dari:

NO	Uraian	Jumlah
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0
2	Bahan Kimia	6.624.533.798,0
3	Bahan Baku	0
4	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0
5	Isi Tabung Gas	0
6	Bahan Lainnya	0
7	Suku Cadang Alat Kedokteran	0
8	Alat Tulis Kantor	1.237.991.537,05
9	Kertas dan Cover	0
10	Bahan Cetak	0
11	Benda Pos	0
12	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0
13	Bahan Komputer	0
14	Perabot Kantor	0
15	Alat Listrik	0
16	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0
17	Obat	17.880.007.725,29
18	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0
19	Natura	411.492.000,00
Jumlah		**26.154.025.060,39**

6) Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 tersaji sebesar Rp 572.065.868.973,00,- dan Rp 510.036.093.901,00,-Aset Tetap yang tersaji

merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel berikut:

Rincian Aset Tetap

No	Jenis	T.A 2023	T.A. 2022
1	Tanah	24.178.579.746,00	23.721.534.746,00
2	Peralatan dan Mesin	519.037.834.524,00	480.227.933.602,00
3	Gedung dan Bangunan	387.504.135.686,00	366.710.033.617,00
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.626.083.522,00	47.656.498.889,00
5	Aset Tetap Lainnya	27.994.000,00	28.851.552,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.283.614.500,00	6.283.614.500,00
7	Akumulasi Penyusutan	-414.592.373.005,00	-414.592.373.005,00
JUMLAH ASET TETAP		572.065.868.973,00	510.036.093.901,00

a. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp 24.178.579.746,- dan Rp 23.721.534.746,-

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	**Rp**
Mutasi tambah:	
Pembelian tanah untuk Puskesmas	Rp
Mutasi dari SKPD lain	
Koreksi tambah Aset	Rp
Total Tambah	**Rp**
Mutasi kurang:	
Mutasi ke SKPD lain	
Penghapusan	**Rp**
Total kurang	**Rp**
Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**

Tanah yang tercatat di Neraca OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKabupaten Kebumen terdiri dari :

No	Uraian	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	108.433.950,00	0	0	108.433.950 00
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	487.718.000,00	0	0	487.718.000
3	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	22.249.586.921,00	489.792.550	0	22.739.379.471
4	Tanah Lapangan Parkir	5.725.000,00	0	0	5.725.000
5	Tanah Kampung	870.070.875,00	0	32.747.550	837.323.325
	Jumlah	23.721.534.746,00	489.792.550	32.747.550	24.178.579.746,00

b. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp 519.037.834.524,- dan Rp 480.227.933.602-

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Saldo per 31 Desember 2020	**Rp** 519.037.834.524
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	Rp
Mutasi dari SKPD lain	Rp
Reklas/koreksi tambah Aset	Rp
Total tambah	
Mutasi kurang:	
Penghapusan	Rp
Rusak Berat	Rp
Mutasi ke SKPD lain	Rp
Koreksi	Rp
Reklas (dari BM Intra ke Ekstra)	Rp
Total kurang	Rp
Saldo per 31 Desember 2022	**Rp** 519.037.834.524

c. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp 387.504.135.686,- dan Rp 366.710.033.617,-

Saldo per 31 Desember 2022	**Rp** 366.710.033.617
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	
Mutasi dari SKPD lain	
Koreksi / Reklas tambah Aset	
Total Tambah	
Mutasi kurang:	

Penghapusan Aset	
Rusak Berat	
Mutasi ke SKPD Lain	
Reklas Aset (dari BM Intra ke Ekstra)	
Total Kurang	
Saldo per 31 Desember 2023	**Rp 387.504.135.686**

Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 387.504.135.686,- terdiri dari :

No	Uraian Gedung dan Bangunan	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Bangunan gedung tempat kerja	Rp 50.133.035.030	Rp 16.773.928.947	Rp 32.520.913.031	Rp 34.386.050.946
2					Rp -
3					Rp -
4					Rp -
	Jumlah	**Rp 50.133.035.030**	**Rp 16.773.928.947**	**Rp 32.520.913.031**	**Rp 34.386.050.946**

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 49.626.083.522,- dan Rp 47.656.498.889,-

Saldo per 31 Desember 2022	**Rp**	**47.446.498.889**
Mutasi tambah:		
Belanja Modal	Rp	-
Mutasi dari SKPD Lain	Rp	-
Koreksi Tambah/reklas aset	Rp	-
Total Tambah		
Mutasi kurang:		
Penghapusa Aset	Rp	-
Rusak Berat	Rp	-
Mutasi ke SKPD Lain	Rp	-
Koreksi/reklas aset	Rp	-
Total Kurang		
Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**47.668.191.149**

Nilai Aset Jaringan sebesar Rp 47.668.191.149,- merupakan Jaringan SIMPUS dan tambah daya gedung Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan

jaringan.Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp 18.864.737.429,00,- dan Rp 16.280.265.593,0,-

Saldo per 31 Desember 2022	**Rp** 16.280.265.593
Mutasi tambah:	
Belanja Modal 2020	Rp -
Mutasi ke SKPD Lain	Rp -
Koreksi Tambah /reklas aset	Rp -
Total Tambah	
Mutasi kurang:	Rp -
Penghapusan Aset	Rp -
Rusak Berat	Rp -
Mutasi ke SKPD	Rp -
Koreksi/reklas aset	Rp -
Total Kurang	
Saldo per 31 Desember 2022	**Rp** 18.864.737.429,

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp 6.283.614.500,- dan Rp 449.432.000,-

Saldo per 31 Desember 2019	**Rp**	**3.056.073.750**
Mutasi tambah:		
Koreksi	Rp	-
Pembelian	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penyelesaian KPD	Rp	2.997.399.750
Saldo per 31 Desember 2020	**Rp**	**58.674.000**

.

g. Akumulasi Penyusutan Aset

Akumulasi Penyusutan Tetap TA. 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp dan Rp. OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKabupaten Kebumen tahun 2020 merupakan tahun ke-6 melakukan pelaporan keuangan dari kas basis ke acrual basis, sehingga tahun 2023 merupakan tahun ke-7 dalam melakukan penyusutan.

7. Dana Cadangan

Dana Cadangann

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dalam hal OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKabupaten Kebumen sebagai SKPD, tidak ada Dana Cadangan pada OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKabupaten Kebumen untuk tahun 2023.

8. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp 176.783.006),-dan Rp 1.557.591.246,-. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Aset Lainnya Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKabupaten Kebumen terdiri dari :

a. Aset Tak Berwujud Lainnya

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp 1.846.233.000,- dan Rp 1.534.246.000,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Saldo per 31 Desember 2022	**Rp**	**1.534.246.000**
Mutasi tambah:		Rp
DED		
Mutasi kurang:		
Amortisasi DED		Rp.
Penghapusan		Rp
Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**1.846.233.000**

b. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.(1.389.469.206),- dan Rp 656.892.046.- Nilai Aset Lain-lain merupakan Aset Tetap yang kondisinya rusak berat yang dimilik Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKabupaten Kebumen. Adapun rincian aset lain-lain sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	**Rp 656.892.046**
Mutasi tambah:	
Belanja Modal 2020	Rp -
Mutasi dari SKPD Lain	Rp -
Koreksi	Rp 0
Reklas	Rp -
Total Tambah	Rp -
Mutasi kurang:	Rp -
Penghapusan Aset	Rp -
Rusak Berat	Rp -
Mutasi ke SKPD lain	Rp -
Koreksi	Rp -
Total Kurang	Rp -
Saldo per 31 Desember 2022	**Rp 656.892.046**

c. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aaset Tidak Berwujud pada TA. 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 633.546.800 dan 633.546.800.

1. KEWAJIBAN

a) Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendekper 31 Desember 2023 dan 2022 tersaji sebesar Rp 23.049.388.702.- dan Rp 53.719.848.752,-

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	43.783.333,00	134.200.000,00
3	Utang Belanja	23.005.605.369,00	53.585.648.752,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Jumlah		23.049.388.702,00	53.719.848.752,00

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing nihil.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga sebesar merupakan potongan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara per 31 Desember 2023

II. Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima oleh Pemerintah Daerah namun belum sepenuhnya merupakan hak Pemerintah Daerah, karena menyangkut pendapatan atas periode berikutnya, yang posisi per 31 Desember 2023 diterima SKPD sebagai berikut:

No.	OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	-	-	Pendapatan diterima dimuka atas.....
2.	-	-	-
3.	--	-	-
4.	-	-	-
	Jumlah	-	-

2. EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 702.251.169.827,17,- dan Rp 670.542.921.904,03,-.

E. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	670.542.921.904,03	63.733.132.930,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(203.836.916.798,86)	(147.051.910.606,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	(4.316.916.502,00)	30.138.952.945,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	239.862.079.224,00	277.821.071.256
EKUITAS AKHIR	702.251.167.827,17	634.560.188.459,03

BAB IV. PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomo 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

b. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

c. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kebijakan desentralisasi di tingkat Kabupaten mengakibatkan dampak pada pemberian kewenangan yang lebih luas bagi daerah kabupaten untuk menyelenggrakan pembengunan kesehatan sesuai kemampuan dan kondisi daerah. Peran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKabupaten Kebumen dalam pembangunan daerah diantranya adalah:

1. Mengembangkan Jaminan Kesehatan
2. Meningkatkan kesadaran perilaku hidup sehat dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
4. Menigkatkan upaya perbaikan gizi masyarakat
5. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular
6. Memperluas akses dan peningkatan pelayanan pada ibu selama

kehamilan dan pasca melahirkan pada pelayanan yang baik dan standart

7. Memperluas akses dan peningkatan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada pelayanan yang baik dan standar
8. Meningkatkan mutu obat dan perbekalan kesehatan
9. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
10. Meningkatkan kualitas managemen pelayanan kesehatan

Sesuai Peraturan Bupati Kebumen nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanabahwa Dinas merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanaterdiri atas (1) Kepala Dinas , (2) Sekretariat, (3) Bidang Kesehatan Masyarakat, (4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, (5) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas, (7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas, mempunyai tugas membantu Buoati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembentuan yang diberikan kepada Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan pelayanan serta sumber daya kesehatan
b. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan pelayanan dan sumber daya kesehatan
c. Pelaksanaan koordinasi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan pelayanan dan sumber daya kesehatan
d. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan pelayanan dan sumber daya kesehatan
e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat,

pencegahan dan pengendalian penyakit dan pelayanan dan sumber daya kesehatan

f. Pelaksanaan administrasi Dinas

g. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas dan

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya

Sesuai Peraturan Daerah Tersebut Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
2) Subbagian Keuangan
3) Kelompok Jabatan Fungsional

3. Bidang, terdiri dari

A. Bidang Sumber Daya, Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan , terdiri dari :

1) Subkoordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan
2) Subkoordinator Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan
3) Subkoordinator Pembinaan dan Pengawasan Perizinan.

B. Pelayanan Kesehatan , terdiri dari :

1) Subkoordinator Kefarmasian dan Penunjang Fasilitas Kesehatan
2) Subkoordinator Pengembangan Fasilitas Kesehatan
3) Subkoordinator Mutu dan Regulasi Kesehatan

C. Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Masyarakat , terdiri dari :

1) Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
2) Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kerja, Olah Raga dan Operasional Fasilitas Kesehatan
3) Subkoordinator Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular

D. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari :

1) Subkoordinator Pengendalian Kependudukan
2) Subkoordinator Keluarga Berencana

3) Subkoordinator Keluarga Sejahtera dan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi

E. 38 UPTD yang berada dibawah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKabupaten Kebumen terdiri dari :

1. UPTD Unit Puskesmas Adimulyo
2. UPTD Unit Puskesmas Alian
3. UPTD Unit Puskesmas Ambal I
4. UPTD Unit Puskemas Ambal II
5. UPTD Unit Puskesmas Ayah 1
6. UPTD Unit Puskesmas Ayah 2
7. UPTD Unit Puskesmas Bonorowo
8. UPTD Unit Puskesmas Buayan
9. UPTD Unit Puskesmas Buluspsantren I
10. UPTD Unit Puskesmas Buluspesantren II
11. UPTD Unit Puskesmas Gombong I
12. UPTD Unit Puskesmas Gombong II
13. UPTD Unit Puskesmas Karanganyar
14. UPTD Unit Puskesmas Karanggayam I
15. UPTD Unit Puskesmas Karanggayam II
16. UPTD Unit Puskesmas Karangsambung
17. UPTD Unit Puskemas Kebumen I
18. UPTD Unit Puskesmas Kebumen II
19. UPTD Unit Puskesmas Kebumen III
20. UPTD Unit Puskesmas Klirong I
21. UPTD Unit Puskesmas Klirong II
22. UPTD Unit Puskesmas Kutowinangun
23. UPTD Unit Puskesmas Kuwarasan
24. UPTD Unit Puskesmas Mirit
25. UPTD Unit Puskesmas Padureso
26. UPTD Unit Puskemas Pejagoan
27. UPTD Unit Puskesmas Petanahan
28. UPTD Unit Puskesmas Poncowarno
29. UPTD Unit Puskesmas Prembun

30. UPTD Unit Puskesmas Puring
31. UPTD Unit Puskemas Rowokele
32. UPTD Unit Puskesmas Sadang
33. UPTD Unit Puskesmas Sempor I
34. UPTD Unit Puskesmas Sempor II
35. UPTD Unit Puskesmas Sruweng
36. UPTD Unit Pengobatan Penyaki Paru
37. UPTD Unit Labkesda
38. RSUD Prembun
39. RSUD DR. SOEDIRMAN

BAB V. PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKabupaten Kebumen tahun anggaran 2023 dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan yang harus dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari penggunaan dana APBD, serta sebagai perwujudan akuntabilitas SKPD sebagai sebuah entitas akuntansi /pelaporan.

Kebumen, 31 Desember 2023

PENGGUNA ANGGARAN

dr. Iwan Danardono, Sp. Rad, M.M.R

NIP. 19680321 199903 1 006